



RENCANA KERJA

Tahun 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 untuk keselarasan program pembangunan daerah.

Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini sebagai pedoman pelaksanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Singaparna, 29 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tasikmalaya



H. AGUS BAHTIAR, SE
Pembina Utama Muda
NIP.19660211 199202 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PEDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA URUSAN PENANAMAN MODAL, URUSAN TENAGA KERJA DAN URUSAN TRANSMIGRASI TAHUN 2021	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Tahun 2021 dan Capaian Renstra Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi	II-15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi	II-17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSPTK KABUPATEN TASIKMALAYA.....	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.....	III-3
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSPTK KABUPATEN TASIKMALAYA.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Tahun 2021 dan Prakiraan Capaian Tahun 2022	II-2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya..	II-16
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya.....	II-20
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya	II-37
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023.....	III-4
Tabel 3.2	Tujuan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya	III-5
Tabel 3.3	Sasaran DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya	III-5
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.....	IV-3
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi perangkat daerah untuk memasukkan program, kegiatan dan subkegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2023, serta merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah untuk mengetahui capaian kinerja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Renja ini akan menjadi bagian dari Renstra DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodevikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 61).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 adalah panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023. Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA URUSAN PENANAMAN MODAL, URUSAN TENAGA KERJA DAN URUSAN TRANSMIGRASI TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja

dan Urusan Transmigrasi Tahun 2021 dan Capaian Renstra Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSPTK KABUPATEN TASIKMALAYA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSPTK KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA URUSAN PENANAMAN MODAL,
URUSAN TENAGA KERJA DAN URUSAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Tahun 2021 dan Capaian Renstra Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah sd tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sd tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+6+9)	11=(10/4)
2										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2	18	01								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	75	73,37	73	73,37	105%	75	79	106%

2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14%	18%	18%	18%	18	14%		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	2 dokumen	67%
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD DAN Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	0%	-	-	
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	100%	6 laporan	3 laporan	50%
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi keuangan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14%	14 bulan	7 bulan	50%
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	840 orang/bulan	720 orang/bulan	720 orang/bulan	720 orang/bulan	100%	840 orang/bulan	420 orang/bulan	
2	18	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	-	
2	18	01	2.05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi	5 orang	-	-	-	-	5 orang	-	

2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	36%	12 bulan	36%	36%	12 bulan		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya)	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	100%	34 unit	6 unit	18%
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	1 unit	33%
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi)	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	6 unit	50%
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan jumlah Investor		10,76%	3%	10,76%	358,67%			
	18	02	2.02		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi		-	1	-	-		-	

					Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor								
	18	02	2.02	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 dokumen	-	1	-	-	0 dokumen	-	
	18	02	2.02	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	0 kegiatan	-	-	-	-	0 kegiatan	-	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	-	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun		20%	5	20%	20%			

2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal		1 dokumen	5	1 dokumen	100%			
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	0 dokumen	-	-	-	-	0 dokumen	-	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	(jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota)	5 dokumen	1 dokumen	1	1 dokumen	100%	5 dokumen	-	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu		86,04	85,2	86,04	100,99%			
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	33 %	9,416%	33	9,416%	9,416%	33 %	23	42%
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara	2500 pelaku usaha	N/A	2000	N/A	100%	2500 pelaku usaha	3801 pelaku usaha	152%

						elektronik								
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perijinan berusaha dan non perijinan penanaman modal	-	-	2000	-	470,80%	-	-	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	12%	12%	12	12%	100%	12%		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM								

					menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 kegiatan	15 kegiatan	15	15 kegiatan	100%	12 kegiatan	6 kegiatan	50%
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	432 pelaku usaha	216 pelaku usaha	216	216 pelaku usaha	100%	238 pelaku usaha	60 pelaku usaha	25%
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 kegiatan	40 kegiatan	40	40 kegiatan	100%	12 kegiatan	6 kegiatan	50%
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100%	-	-	-	-	100%		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	100%	-	-	-	-	100%		

					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2	07	02	'2.01		Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)	jumlah dokumen rencana tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2	07	02	'2.01	01	Penyusunan rencana tenaga kerja makro	jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	-	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	1200 orang	512 orang	848	512 orang	60,38%	1200 orang	128 orang	11%
2	07	03	'2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	1200 orang	512 orang	848	512 orang	60,38%	1200 orang	128 orang	11%

2	07	03	'2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	1200 orang	512 orang	848	512 orang	60,38%	1200 orang	128 orang	11%
2	07	03	'2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04			PROGRAM Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	3313 orang	3347 orang	3281	3347 orang	102,01%	3313 orang	500 orang	15%
2	07	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK.1)	3313 orang	3347 orang	3281	3347 orang	102,01%	3313 orang	500 orang	15%
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan akad, akl dan ulb	3313 orang	3347 orang	3281	3347 orang	100%	3313 orang	500 orang	15%
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	1794 orang	-	1840	-	-	1794 orang	-	-
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100%	100%	100	100%	100%	100%	1	100%
2	07	05	2.02		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100%	100%	100	100%	100%	100%	1	100%

					Kabupaten/Kota									
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perselisihan yang di cegah	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	100%	1 perkara	1	100%
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	100%	1 perkara	1	100%
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lks tripartit yang di bina	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	1	100%
2	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
2	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya								
2	32	03	2.01		Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%		-	

					Kabupaten/Kota									
2	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	
2	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	jumlah calon transmigran dan/atau transmigran yang mendapatkan pelatihan	2 orang	-	-	-	-	2 orang	-	
2	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok		-		-	-		-	
2	32	04	2.01		Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok		-	-	-	-		-	
2	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial,ekonomi dan kelembagaan	2 pemukiman	-	-	-	-	2 pemukiman	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan review hasil evaluasi Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi pelaksanaan renja dan realisasi renstra sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 2 program dan 2 kegiatan. Program/Kegiatan tersebut tidak mencapai target output 100% karena realokasi anggaran terkait pasca pandemi covid-19, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang mencapai terget 100% sebanyak 2 program dan 9 kegiatan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 4 program.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja adalah meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada pelaku usaha mikro kecil (UMK), melakukan sosialisasi/bimbingan teknis kepada para pelaku UMK terkait kebijakan penanaman modal, kemitraan, Online Singel Submission (OSS) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online, serta membangun Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mengurus berbagai macam perizinan dan nonperizinan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi

Berdasarkan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 terkait Urusan Penanaman Modal terdapat 3 Indikator Kinerja Utama (IKU), dan terkait Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 2 Indikator Kinerja Utama (IKU). Target indikator kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator	SPM/ standar nasioal	IKK	Satuan	Traget Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Nilai Reformasi Birokrasi			Skor	24,48 (Poin)	59 / CC	60,50/ B	63 / B	67 / B	70,2/B	25,98 (Poin)		60,50/B	63 / B	
2	Nilai realisasi penanaman modal ikk		IKK	Rp. (juta)	145.456	80.000	82.400	84.872	87.418	90.041	8.599,7		82.400	84.872	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan			Skor	85,2	85,8	86	86,2	86,3	86,4	86,04		86	86,2	
4	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan ikk		IKK	Persen	27,08%	27,23%	27,38%	27,52 %	27,67 %	27,81%	29,37%		27,38%	27,52%	
5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ikk		IKK	Persen	2,92%	3,75%	4,58%	5,42%	6,25%	7,08%	3,28%		4,58%	5,42%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, sudah menjadi tugas DPMPTSPTK untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan dengan permasalahan, antara lain pertumbuhan ekonomi melambat, peningkatan pengangguran, dan penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri dan jasa. Hal ini akan berdampak terhadap pencapaian berbagai sasaran pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka menengah, karena banyak program kegiatan yang ditunda pelaksanaannya untuk menangani pandemi covid-19.

Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan iklim investasi adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja akan berdampak bagi penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan. Undang-undang ini juga diklaim memberikan kemudahan untuk pelaku usaha terutama UMKM, membentuk ekosistem investasi yang kondusif, dan terciptanya lapangan kerja untuk mengakomodasi kebutuhan angkatan kerja.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya akan terus melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dengan memanfaatkan faktor-faktor pendorong, hasil yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan jumlah investor dan realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Tasikmalaya;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, mempermudah dan mempercepat proses perizinan dengan menjalankan SP dan SOP yang telah disesuaikan dengan Online Single Submission (OSS);
3. Meningkatkan pemberian informasi perizinan dan penanaman modal, tidak hanya melalui tatapan langsung, tetapi juga menggunakan berbagai media, baik melalui media masa, televisi, maupun website dan layanan online;
4. Meningkatkan kesempatan kerja; dan
5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan awal Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023. Isu strategis yang telah dirumuskan dalam RKPD

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 yang terkait dengan DPMPSTPK Kabupaten Tasikmalaya adalah peningkatan iklim investasi, dengan prioritas pembangunan daerah Pengembangan Mall Pelayanan Publik.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Tasikmalaya

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	DPMPTSPTK					30.864.144.078	DPMPTSPTK					30.864.144.078	
A	Urusan Penanaman Modal	DPMPT SPTK				11.899.144.911	Urusan Penanaman Modal	DPMPT SPTK				11.899.144.911	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	persen	100	8.149.144.911	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	persen	100	8.149.144.911	
1.1	<i>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan perangkat daerah</i>	<i>dok</i>	<i>14</i>	<i>145.000.000</i>	<i>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan perangkat daerah</i>	<i>dok</i>	<i>14</i>	<i>145.000.000</i>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		tersusunnya Perubahan Renja 2023, Ranwal Renja 2025 dan Renja 2023	dok	3	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		tersusunnya Perubahan Renja 2023, Ranwal Renja 2025 dan Renja 2023	dok	3	75.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		jumlah laporan capaian kinerja daan ikhtisar realisasi kerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	5	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		jumlah laporan capaian kinerja daan ikhtisar realisasi kerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	5	40.000.000	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	6	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	6	30.000.000	
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Terselenggaranya layanan administrasi keuangan</i>	<i>Bulan</i>	14	5.598.187.411	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Terselenggaranya layanan administrasi keuangan</i>	<i>bulan</i>	14	5.598.187.411	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	5.598.187.411	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarkannya a Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	5.598.187.411	
1.3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Terselenggaraan layanan administrasi kepegawaian</i>	<i>bulan</i>	12	50.000.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Terselenggaraan ya layanan administrasi kepegawaian</i>	<i>bulan</i>	12	50.000.000	
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah aparatur DPMPSTP yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidangnya	orang	5	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah aparatur DPMPSTP yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidangnya	orang	5	50.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya adminitrasi umum	bulan	12	755.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya adminitrasi umum	bulan	12	755.000.000	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	220.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	220.000.000	
1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	120.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	120.000.000	
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan	bulan	12	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan	bulan	12	30.000.000	
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	bulan	12	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	bulan	12	25.000.000	
1.4.5	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	310.000.000	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	310.000.000	
1.4.6	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Jumlah Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	1	50.000.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Jumlah Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	1	50.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	bulan	12	740.957.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	bulan	12	740.957.500	
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	12	308.357.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	12	308.357.500	
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	432.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	432.600.000	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	860.000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	860.000.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya)	bulan	12	450.000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya)	bulan	12	450.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	250.000.000	
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	160.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	160.000.000	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase kenaikan jumlah Investor	persen	3	600.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase kenaikan jumlah Investor	persen	3	600.000.000	
2,1	<i>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	dok	1	200.000.000	<i>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Dok	1	200.000.000	
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan	dok	1	200.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Dok	1	200.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Kemudahan Penanaman Modal		Kemudahan Penanaman Modal				Kemudahan Penanaman Modal		Kemudahan Penanaman Modal				
2,2	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah peta potensi investasi	dok	1	400.000.000	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah peta potensi investasi	Dok	1	400.000.000	
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen RUPM yang tersusun	dok	1	200.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen RUPM yang tersusun	Dok	1	200.000.000	
2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dok	1	200.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dok	1	200.000.000	
3	Program Promosi Penanaman Modal		Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	Pameran	5	500.000.000	Program Promosi Penanaman Modal		Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	Pameran	5	500.000.000	
3.1	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting, penerimaan misi penanaman modal	Pameran	5	500.000.000	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting, penerimaan misi penanaman modal	Pameran	5	500.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kot a		jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kot a)	Pame ran	5	500.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kot a		jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kot a)	Pame Ran	5	500.000.000	
4	Program Penanaman Modal		Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	Jenis izin	55	1.750.000.000	Program Penanaman Modal		Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	Jenis Izin	55	1.750.000.000	
4.1	<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	persen	31	1.750.000.000	<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	persen	31	1.750.000.000	
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		Jumlah perizinan dan nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan online	17	100.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		Jumlah perizinan dan nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan online	17	100.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	secara Elektronik						secara Elektronik						
4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	izin	3300	1.500.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	izin	3300	1.500.000.000	
4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Persentase jumlah pengaduan dan konsultasi yang dilayani	persen	100	100.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Persentase jumlah pengaduan dan konsultasi yang dilayani	persen	100	100.000.000	
4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	laporan	1	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	laporan	1	50.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	persen	14	650.000.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	persen	14	650.000.000	
5.1	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		jumlah pelaku usaha yang taat LKPM	Pelaku Usaha	14	650.000.000	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		jumlah pelaku usaha yang taat LKPM	Pelaku Usaha	14	650.000.000	
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	40	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	40	200.000.000	
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	150	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	150	250.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Pelaku Usaha	80	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Pelaku Usaha	80	200.000.000	
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	persen	100	250.000.000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	persen	100	250.000.000	
6.1	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten Kota</i>		Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	persen	100	250.000.000	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten Kota</i>		Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	persen	100	250.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	persen	100	250.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	persen	100	250.000.000	
B	URUSAN BIDANG TENAGA KERJA					17.999.999.167	URUSAN BIDANG TENAGA KERJA					17.999.999.167	
7	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	dok	1	250.000.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	dok	1	250.000.000	
7.1	Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)		jumlah dokumen rencana tenaga kerja	dok	1	250.000.000	Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)		jumlah dokumen rencana tenaga kerja	dok	1	250.000.000	
7.1.1	Penyusunan rencana tenaga kerja makro		jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	dok	1	250.000.000	Penyusunan rencana tenaga kerja makro		jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	dok	1	250.000.000	
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	orang	1200	6.250.000.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	orang	1200	6.250.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
8.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang dilatih	orang	1200	6.250.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang dilatih	orang	1200	6.250.000.000	
8.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Terlaksananya pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)	orang	1200	6.000.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Terlaksananya pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)	orang	1200	6.000.000.000	
8.1.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	unit	1	250.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	unit	1	250.000.000	
9	Program Penempatan Tenaga Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	orang	3345	10,849.999.167	Program Penempatan Tenaga Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	orang	3345	10,849.999.167	
9.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK.1)	bulan	12	10.849.999.167	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK.1)	bulan	12	10.849.999.167	
9.1.1	Pelayanan antar Kerja		jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan akad, akl dan ulb	bulan	12	500.000.000	Pelayanan antar Kerja		jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan akad, akl dan ulb	bulan	12	500.000.000	
9.1.2	Perluasan Kesempatan Kerja		jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui	orang	1840	10.349.999.167	Perluasan Kesempatan Kerja		jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui	orang	1840	10.349.999.167	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			program perluasan kesempatan kerja						program perluasan kesempatan kerja				
10	Program Hubungan Industrial		Persentase kasus HI yang diselesaikan	persen	100	650.000.000	Program Hubungan Industrial		Persentase kasus HI yang diselesaikan	persen	100	650.000.000	
10.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kasus HI yang diselesaikan	Persen	100	650.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kasus HI yang diselesaikan	Persen	100	650.000.000	
10.1.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Pembinaan Ketenagakerjaan ke perusahaan	perusahaan	24	200.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Pembinaan Ketenagakerjaan ke perusahaan	perusahaan	24	200.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
10.1.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peringatan Hari Buruh, Bintek Hubungan Industrial, Monev Data Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan	Kegiatan, peserta, kunjungan	1, 30, 24	250.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peringatan Hari Buruh, Bintek Hubungan Industrial, Monev Data Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan	Kegiatan, peserta, kunjungan	1, 30, 24	250.000.000	
10.1.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Draft Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Terlaksananya Forum LKS Tripartit Kabupaten	Dok, Kali	4,4	200,000,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Draft Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Terlaksananya Forum LKS Tripartit Kabupaten	Dok, Kali	4,4	200,000,000	
C	URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI					965,000,000	URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI					965,000,000	
11	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	orang	40	765,000,000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	Orang	40	765,000,000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
11.1	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a</i>		Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	<i>orang</i>	40	765,000,000	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a</i>		Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	<i>Orang</i>	40	765,000,000	
11.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a		jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	laporan	1	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a		jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Laporan	1	400,000,000	
11.1.2	Pelatihan Transmigrasi		Pelatihan Translok	kegiatan	2	365,000,000	Pelatihan Transmigrasi		Pelatihan Translok	Kegiatan	2	365,000,000	
12	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	paket	2	200,000,000	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	2	200,000,000	
12.1	<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>		Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	2	200,000,000	<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>		Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	2	200,000,000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
12.1.1	Koordinasi dan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial,ekonomi dan kelembagaan	Lokasi	2	200,000,000	Koordinasi dan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial,ekonomi dan kelembagaan	Lokasi	2	200,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Tahun 2023 kami peroleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dengan mengundang Perangkat Daerah yang terkait tugas dan fungsi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya dan organisasi kemasyarakatan.

Forum Perangkat Daerah tersebut diselenggarakan guna menerima saran dan masukan-masukan dari peserta untuk penyempurnaan rancangan awal Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Masukan-masukan yang diperoleh secara umum dapat disimpulkan bahwa para peserta berharap agar DPMPTSPTK meningkatkan kualitas pelayanan, mempromosikan potensi investasi kabupaten tasikmalaya.

Dari masukan tersebut, usulan Program/Kegiatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Tasikmalaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kabupaten Tasikmalaya			
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
1.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	1200 orang	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kabupaten Tasikmalaya			
2.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				
2.1.1	Perluasan Kesempatan Kerja		jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja (padat karya)	1840 orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Pembangunan Ekonomi Yang Eksklusif dan Berkelanjutan”**.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

1. percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 adalah Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Pertumbuhan Pusat-Pusat Ekonomi, Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan Perikanan, Peningkatan Infrastruktur pariwisata dan Pengembangan Desa Wisata, Pemulihan dan

Penumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah, Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial, Peningkatan Daya Saing Olahraga dan Kepemudaan, Inovasi Pelayanan Publik dan Pengembangan Desa Mandiri.

Arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional tahun 2023 selanjutnya ditungkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP 2023, meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi hijau

Mengingat Indonesia akan mencapai *net-zero* emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim

7. Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi

Program Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSPK adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan kerkeadilan, dengan sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian, dengan salah satu indikator sasaran yaitu

Pertumbuhan Investasi (PMTB) dengan target 5,3-5,9% dan penyediaan lapangan kerja per tahun dengan target 2,3 – 2,8 juta orang.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan kerkeadilan, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas. Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya adalah Program Prioritas Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dengan indicator:

1. Jumlah tenaga kerja industri pengolahan 20,9 juta orang
2. Kontribusi tenaga kerja di sektor industry terhadap total pekerja 15%;
3. Jumlah tenaga kerja pariwisata 14,7 juta orang;
4. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif 18,6 juta orang;
5. Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/EODB 51 peringkat
6. Realisasi Investasi PMA dan PMDN Rp. 968,4 Triliun.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 merupakan acuan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan Renja Tahun 2023. Pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, telah dirumuskan tema pembangunan yaitu “**Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan UMKM Berbasis Digital**”

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi
2. Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan Perikanan
3. Peningkatan Infrastruktur pariwisata dan Pengembangan Desa Wisata
4. Pemulihan dan Penumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19
5. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah
7. Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial
8. Peningkatan Daya Saing Olahraga dan Kepemudaan
9. Inovasi Pelayanan Publik
10. Pengembangan Desa Mandiri

Dalam rangka mewujudkan peningkatan iklim investasi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi	Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal

				Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	IKM Pelayanan Perizinan
				Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan
				Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Tabel 3.2
Tujuan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja PD Tahun 2023
1	Meningkatkan investasi daerah	Persentase Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4%

Tabel 3.3
Sasaran DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2023
1	Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	60,50 / B
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp (juta) 155.812
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	IKM Pelayanan Perizinan	86
4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	27,38%
5	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	4,58%

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk memenuhi target indikator tujuan dan sasaran Renja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya 2023, diwujudkan melalui program dan kegiatan. Program dan Kegiatan dirumuskan berdasarkan pertimbangan terhadap:

- a. Program Nasional;
- b. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023;
- c. Pencapaian SDG'S;
- d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Rencana program yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 30.864.144.078,00** (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.1, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Akselerasi Implementasi SPEE	Meningkatnya iklim investasi							30.864.144.078			31.528.250.767				
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									11.899.144.911			12.543.472.157				
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja (NILAI SAKIP)	75,5				8.149.144.911			8.448.472.157				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi KinerjaPerangka t Daerah									145.000.000		145.000.000					
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna , Sukaasih		jumlah dokumen perencana an perangkat daerah	3 Dokume n	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokume n	75.000.000	A P B D	3 Dokumen	75.000.000				
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna , Sukaasih		jumlah laporan capaian kinerja daan ikhtisar realisasi kerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusuna n laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	jumlah laporan capaian kinerja daan ikhtisar realisasi kerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	A P B D	5 Laporan	40.000.000					

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	01	2.01	07	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah					jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	30.000.000	A P B D	6 laporan	30.000.000				
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5.598.187.411			5.693.096.782				
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna , Sukaasih		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	Terbayarkan nya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.598.187.411	A P B D	14 Bulan	5.693.096.782				
2	18	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									50.000.000			55.000.000				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	01	2.05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab.Tasik malaya,Singaparna , Sukaasih			Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 orang	Jumlah aparatur DPMPSTSP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidangnya	5 orang	50.000.000		5 orang	55.000.000			
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									755.000.000			810.000.000				
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab.Tasik malaya,Singaparna , Sukaasih			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	220.000.000	A P B D	12 Bulan	220.000.000			
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab.Tasik malaya,Singaparna , Sukaasih			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	120.000.000	A P B D	12 Bulan	140.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna , Sukaasih			jumlah dokumen dan bahan bacaan perundang undangan yang di sediakan	12 Bulan	jumlah dokumen dan bahan bacaan perundang undangan yang di sediakan	12 Bulan	30.000.000	A P B D	12 Bulan	50.000.000			
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna , Sukaasih			Terfasilitasi nya Kunjungan Tamu	12 Bulan	Terfasilitasi nya Kunjungan Tamu	12 Bulan	25.000.000	A P B D	12 Bulan	40.000.000			
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna , Sukaasih			jumlah laporan penyeleng araan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	jumlah laporan penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	310.000.000	A P B D	12 Bulan	310.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	01	2.06	10	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD			Kab Tasikmalaya			Jumlah Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	50.000.000	APBD	1 dokumen	50.000.000			
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									740.957.500			875.375.375				
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab.Tasikmalaya,Singaparna,Sukaasih			jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	308.357.500	APBD	12 Bulan	342.775.375			
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab.Tasikmalaya,Singaparna,Sukaasih			jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12 Bulan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12 Bulan	432.600.000	APBD	12 Bulan	532.600.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								860.000.000			870.000.000					
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna Sukaasih			(jumlah kendaraan peroranga n dinas /kendaraa n dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Bulan	jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya)	12 Bulan	450.000.000	A P B D	12 Bulan	460.000.000			
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna Sukaasih			jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/re habilitasi	12 Bulan	Terlaksana n/ Pemeliharaa n/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	250.000.000	A P B D	12 Bulan	250.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna Sukaasih			(jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ba ngunan lainnya yang dipelihara/ direhabilit asi)	12 Bulan	Terlaksana ya Pemeliharaa n/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	160.000.000	AP BD	12 Bulan	160.000.000			
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL				Persentas e kenaikan jumlah Investor	3%					600.000.000			50.000.000			
	18	02	2.02		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insenti f Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										200.000.000			50.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
	18	02	2.02	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Kab.Tasikmalaya,Singaparna, Sukaasih					1 dokumen		0 dokumen	200.000.000		0 dokumen				
	18	02	2.02	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Kab.Tasikmalaya,Singaparna, Sukaasih			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0 laporan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 laporan		1 kegiatan	50.000.000				
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											400.000.000			75.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Kab.Tasikmalaya,Singaparna , Sukaasih			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	1 dokumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	200.000.000	APBD	0	-			
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Kab.Tasikmalaya,Singaparna , Sukaasih			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	1 dokumen	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokumen	200.000.000		1 dokumen	75.000.000			
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Meningkatnya iklim investasi	850 Investor					500.000.000			800.000.000			
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									500.000.000			800.000.000				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			Kab.Tasikmalaya,Singaparna , Sukaasih			Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten /kota	0 kegiatan	Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting, penerimaan misi penanaman modal	0 kegiatan			1 dokumen	100.000.000			
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Kab.Tasikmalaya,Singaparna , Sukaasih			(jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten /kota)	5 Pameran	jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota)	5 Pameran	500.000.000	APBD	5 dokumen	700.000.000			
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	55			1.750.000.000			2.350.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								1.750.000.000			2.350.000.000					
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna , Sukaasih			jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2.500 ijin	Jumlah perizinan dan nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.500 ijin	100.000.000	A P B D K a b u p a t e n T a s i k m a l a y a P B D P r	2.500 ijin	200.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna Sukaasih			jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantaua n pemenuha n komitmen perijinan berusaha dan non perijinan penanama n modal	5 kegiatan	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	5 kegiatan	1.500.000.000	A P B D	5 kegiatan	2.000.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna , Sukaasih			Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 orang			Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 orang	100.000.000	APBD	50 orang	100.000.000			
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna , Sukaasih			Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah kabupaten/kota	1 kegiatan			Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah kabupaten/kota	1 laporan	50.000.000		1 kegiatan	50.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Meningka tnya Ketaatan Pelaku Usaha untuk melaksan akan LKPM	14%					650.000.000			695.000.000			
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										650.000.000			695.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab.Tasikmalaya,Singaparna,Sukaasih			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 kegiatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 kegiatan	200.000.000	D A K N O N F I S I K	12 kegiatan	220.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab.Tasikmalaya,Singaparna , Sukaasih			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Pelaku Usaha		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Pelaku Usaha	250.000.000	D A K N O N F I S I K	150 Pelaku Usaha	275.000.000			
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab.Tasikmalaya,Singaparna , Sukaasih			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 kegiatan		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 kegiatan	200.000.000	D A K N O N F I S I K	12 kegiatan	200.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Persentas e Pengelola an Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegra si	100%					250.000.000		250.000.000				
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										250.000.000		250.000.000				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kab.Tasik malaya,Si ngaparna Sukaasih			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaat kan	1 dokume n	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka n	1 dokumen	250.000.000	A P B D	1 dokumen	250.000.000			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											17.999.999.167		18.119.778.610			
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				Tersusun nya dokumen perencana an tenaga kerja							250.000.000					

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	07	02	2.01		Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)								250.000.000								
2	07	02	2.01	01	Penyusunan rencana tenaga kerja makro			Kab.Tasik malaya,Singaparna , Sukaasih		jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 dokumen	jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 dokumen	250.000.000	APBD	0	-				
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								6.250.000.000			6.350.000.000					
2	07	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi				6.250.000.000			6.350.000.000					

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Kab. Tasikmalaya			jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	1200 Orang	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	1200 Orang	6.000.000.000	A P B D . D B H C H T	1200 Orang	6.100.000.000			
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			UPTD BLK			Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	1 Unit	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	1 Unit	250.000.000	A P B D	1 Unit	250.000.000			
2	07	04			PROGRAM Penempatan Tenaga Kerja					Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan				10.849.999.167			11.119.778.610				
2	07	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota									10.849.999.167			11.119.778.610				
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja			Kab Tasikmalaya			jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan akad, akl dan ulb	3345 orang	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan akad, akl dan ulb	3345 orang	500.000.000	A P B D	3377 orang	500.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja			Kab Tasikmalaya			jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	1.840 orang		jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	1.840 orang	10.349.999.167	A P B D . B A N P R O V	1.932 orang	10.619.778.610			
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Persentase kasus HI yang diselesaikan	100%					650.000.000			650.000.000				
2	07	05	2.02		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										650.000.000			650.000.000				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a		Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional	Ket
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target												
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab Tasikmalaya			(jumlah perselisihan yang dicegah)	1 perkara	(jumlah perselisihan yang dicegah)	1 perkara	200.000.000	APBD	1 perkara	200.000.000								
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab Tasikmalaya			Peringatan Hari Buruh, Bintek Hubungan Industrial, Monev Data Ketenagakerjaan di perusahaan - perusahaan, jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	1 perkara	Peringatan Hari Buruh, Bintek Hubungan Industrial, Monev Data Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan, jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	1 perkara	250.000.000	APBD	1 perkara	250.000.000								

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			Kab Tasikmal aya			jumlah lks tripartit yang di bina	1 lembaga	jumlah lks tripartit yang di bina	1 lembaga	200.000.000	A P B D	1 lembaga	200.000.000			
2	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									965.000.000			865.000.000				
2	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					Jumlah transmigra n yang telah difasilitasi pembinaan nya				765.000.000			765.000.000				
2	32	03	2.01		Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota									765.000.000			765.000.000				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab Tasikmalaya			jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	400.000.000	APBD	1 laporan	400.000.000			
2	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi			Kab Tasikmalaya			jumlah calon transmigran dan/atau transmigran yang mendapatkan pelatihan	10 orang	jumlah calon transmigran dan/atau transmigran yang mendapatkan pelatihan	10 orang	365.000.000	APBD	10 orang	365.000.000			
2	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRAN					Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok					200.000.000			100.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	S u m b e r D a n a	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Keterangan		Ket	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangun an Provinsi	Prioritas Pembangun an Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	32	04	2.01		Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian								200.000.000			100.000.000						
2	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman			Kab Tasikmal aya			jumlah satuan permukima n yang dikembang kan dalam rangka penguatan infrastrukt ur sosial,ekon omi dan kelembaga an	2 pemuki man		jumlah satuan permukiman yang dikembang kan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial,ekono mi dan kelembagaan	2 pemukim an	200.000.000	A P B D	1 pemukim an	100.000.000			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya yaitu Meningkatkan daya saing daerah dalam menunjang kemudahan berusaha, telah ditetapkan sasaran melalui Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Meningkatnya realisasi penanaman modal, Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, Meningkatnya Kesempatan Kerja, Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Meningkatnya Jumlah Transmigran yang bersertifikat.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi umum dan pemeliharaan barang milik daerah.
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2026.
- c. Program Promosi Penanaman Modal;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah mengikuti acara pameran untuk mempromosikan potensi investasi Kabupaten Tasikmalaya.

- d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyelenggaraan mall pelayanan publik, mengintegrasikan 18 perizinan kedalam Sistem Perizinan Elektronik Kabupaten Tasikmalaya (SPEKTA), pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan serta penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan.
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada para pelaku usaha di Kabupaten Tasikmalaya.
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah mengelola data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.
- g. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- h. Program Penempatan Kerja
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota.
- i. Program Hubungan Industrial
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
- j. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- k. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.
- l. Program Perencanaan tenaga kerja
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyusunan rencana tenaga kerja makro.

Rencana program dan kegiatan pada DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, yaitu:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan		
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Program:		
		1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Kegiatan:	
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	
			• Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan:	
			• Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			• Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			Kegiatan:	
			• Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan:	
			• Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			• Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	
			2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Kegiatan:	
	• Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
	Sub Kegiatan:			
	• Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			

No	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan	
			<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
		3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Kegiatan:
			<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan:
			<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
			<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
			<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Program:	
		1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Kegiatan:
			<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
			Sub Kegiatan:
			<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
			<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
			<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
			Kegiatan:
			<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan:
			<ul style="list-style-type: none"> Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

No	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan	
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Kegiatan:
			• Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Sub Kegiatan:
			• Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
			• pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/kota
		2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Kegiatan:
			• Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan:
			• Pelayanan antar Kerja
			• Perluasan Kesempatan Kerja
		3	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
			Kegiatan
			• Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan		
	• Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Kegiatan:
			• Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan:
			• Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			• Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
		2	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Kegiatan:
			• Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan:
			• Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan	
			• Pelatihan Transmigrasi
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Kegiatan:
			• Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
			Sub Kegiatan:
			• Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
5	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program:	
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
			Kegiatan:
			• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Sub Kegiatan:
			• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Kegiatan:
			• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Sub Kegiatan:
			• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Kegiatan:
			• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Sub Kegiatan:
			• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Kegiatan:
			• Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Sub Kegiatan:
			• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			• Fasilitasi Kunjungan Tamu
			• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Kegiatan:
			• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Sub Kegiatan:
			• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan	
			• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Kegiatan:
			• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Sub Kegiatan:
			• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan Tahun 2023, yaitu:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
1	Inovasi Pelayanan Publik	Program:			
		1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	600.000.000	
			Kegiatan:		
			• Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
			Sub Kegiatan:		
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman	200.000.000	DAU
			• Modal		
			Kegiatan:		
			• Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	400.000.000	
	Sub Kegiatan:				
	• Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DAU		

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
		• Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	200.000.000	DAU
2		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	500.000.000	
		Kegiatan:		
		• Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	500.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	DAU
3		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	650.000.000	
		Kegiatan:		
		• Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	200.000.000	DAK
		• Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250.000.000	DAK
		• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	200.000.000	DAK
4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.750.000.000	
		Kegiatan:		
		• Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.750.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000	DAU
		• Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non	1.500.000.000	DAU

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp)	Ket.	
				Perizinan Penanaman Modal			
				• Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	100.000.000	DAU	
				• Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	50.000.000	DAU	
		5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		250.000.000		
				Kegiatan:			
				• Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000		
				Sub Kegiatan:			
				• Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	250.000.000	DAU	
2	Pemulihan dan Penumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		6.250.000.000		
				Kegiatan:			
					• Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	6.250.000.000	
					Sub Kegiatan:		
					• Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	6.000.000.000	DAU,DB HCHT
					• pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/kota	250.000.000	DAU
			2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		10.849.999.167	
					Kegiatan:		
					• Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	10.849.999.167	
					Sub Kegiatan:		
				• Pelayanan antar Kerja	500.000.000	DAU	
				• Perluasan Kesempatan Kerja	10.349.999.167	DAU dan	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
				Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
		3 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	250.000.000	
		Kegiatan		
		• Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	250.000.000	
		Sub Kegiatan		
		• Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	250.000.000	DAU
		4 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	650.000.000	
		Kegiatan:		
		• Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DAU
		• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	DAU
		• Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DAU
		5 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	765.000.000	
		Kegiatan:		
		• Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	765.000.000	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 	400.000.000	DAU
		<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Transmigrasi 	365.000.000	DAU
	6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200.000.000	
		Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 	200.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman 	200.000.000	DAU
3	Inovasi Pelayanan Publik	Program:		
		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.079.144.911	
		Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	145.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 	75.000.000	DAU
		<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	40.000.000	DAU
		<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	30.000.000	DAU
		Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	5.598.187.411	
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 	5.598.187.411	DAU
		Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 	50.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 	50.000.000	DAU

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
		Perundang-Undangan		
		Kegiatan:		
		• Administrasi Umum Perangkat Daerah	685.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	DAU
		• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.000.000	DAU
		• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	DAU
		• Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000	DAU
		• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.000.000	DAU
		Kegiatan:		
		• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.957.500	
		Sub Kegiatan:		
		• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	308.357.500	DAU
		• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.600.000	DAU
		Kegiatan:		
		• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	450.000.000	DAU
		• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	DAU
		• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.000.000	DAU

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Komitmen dan dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak.

Haparan kami semoga Renja DPMPTSPK Tahun 2023 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance dan peningkatan investasi di Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, 29 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tasikmalaya



H. AGUS BAHTIAR, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19660211 199202 1 001

